

BAB 2

KAJIAN TEORI

2.1 Kebijakan

2.1.1 Pengertian Kebijakan

Kebijakan adalah serangkaian keputusan, perilaku, rencana program, dan tindakan yang diambil oleh pihak-pihak terkait dalam upaya mengatasi masalah yang muncul. (Desrinelti, Afifah, & Gistituati, 2021) Dalam pembuatan kebijakan ini di implementasikan untuk mengamati dampaknya. (Setiawan, Saputra, Yuliatin, & Ilham, 2021). kebijakan sebagai suatu proses melalui tahapan pelaksanaan dan penilaian, dengan menekankan bahwa definisi dan usulan yang terkait dengan kebijakan akan lebih optimal jika tindakan yang dilakukan sesuai dengan tindakan yang disarankan.

Menurut James Anderson, kebijakan adalah suatu tindakan yang ditentukan oleh seorang aktor dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah. Konsep kebijakan ini dianggap dapat diterima karena mengarahkan perhatian pada tindakan yang benar-benar dilakukan, bukan hanya pada apa yang disarankan. Dengan kata lain, gagasan tersebut memisahkan kebijakan dari pilihan ketika membuat keputusan. Kebijakan dalam pemerintahan sebagai alat untuk mencapai tujuan dan program yang diproyeksikan terkait dengan tujuan, nilai, dan praktik (*projected program of objectives, values, and practice*) dibahas oleh Laswell dan Kaplan dalam Abidin (2016). Bagi Friedrich, kebijakan yang paling mendasar adalah tujuan, sasaran, atau maksud. Dari H. Hugh Heglo, kebijakan sebagai suatu tindakan yang bermaksud untuk mencapai tujuan tertentu. Definisi dari Heglo tersebut dilanjutkan dengan sebuah uraian. Maksud dari tujuan adalah sesuatu

yang pasti yang diinginkan, bukan sesuatu yang hanya diinginkan (Raviansyah, 2022)

2.1.2 Kebijakan Kesehatan

Gill Walt (1994) menegaskan bahwa ada keyakinan bahwa budaya kesehatan suatu bangsa benar-benar mencerminkan struktur politik yang berlaku di sana. Keputusan pemerintah mengenai kesehatan disebut sebagai kebijakan kesehatan. Tujuan dari kebijakan kesehatan adalah untuk meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat yang optimal. Kebijakan inti mengenai kesehatan nasional dirumuskan dari Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2012 mengenai Sistem Kesehatan Nasional. Tujuan, sasaran, dasar, dan landasan dari penyelenggaraan semua inisiatif kesehatan di Indonesia diuraikan dalam kebijakan ini. Di sisi lain, kebijakan publik merupakan salah satu komponen dari kebijakan secara keseluruhan, yang merupakan komponen dari kebijakan umum seperti yang ditunjukkan dalam struktur berikut. (Agustina, 2020)

Menurut World Health Organization (WHO),: Faktor-faktor berikut ini harus diperhitungkan ketika menilai mutu rencana layanan kesehatan:

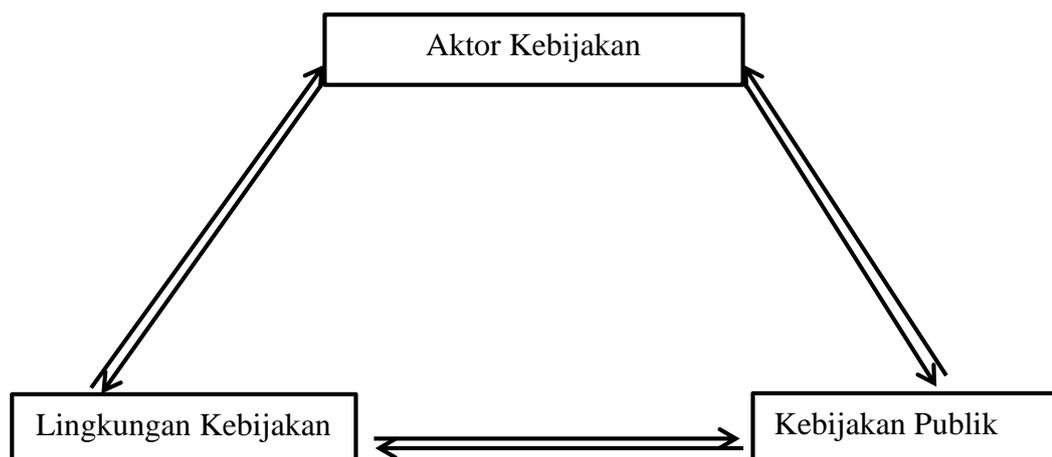
1. Definisi kesehatan yang prima dalam teori holistik adalah sesuatu yang kaya dan mencakup semua komponen mental, fisik, sosial, dan spiritual. Selain tindakan kuratif, strategi promosi kesehatan harus mencakup tindakan pencegahan, promosi, dan rehabilitasi.
2. Efisiensi dan efektivitas kebijakan akan meningkat dengan adanya partisipasi, yang sering dikenal dengan pelibatan masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat dapat menghasilkan aksi kolektif-sebuah

instrumen yang ampuh untuk memberlakukan hukum dan menyelesaikan masalah-melalui aksi partisipatif.

3. Kebijakan kesehatan masyarakat, yaitu semua kebijakan yang perlu dipraktikkan dengan hati-hati untuk menghentikan peningkatan perawatan kesehatan preventif yang mencakup semua hal dan dapat diterapkan secara luas.
4. Keadilan membutuhkan alokasi perawatan kesehatan yang adil.
5. Efisiensi adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan optimalisasi sumber daya dan teknologi secara proaktif dalam layanan kesehatan.
6. Kualitas membutuhkan penyediaan layanan kesehatan terbaik oleh pemerintah.
7. Pemberdayaan masyarakat: Hal ini dapat membantu mengoptimalkan jumlah kapasitas daya cadangan yang tersedia.
8. Mandiri dan mampu mengevaluasi kepercayaan dan keyakinan masyarakat terhadap mereka sebagai sumber daya kesehatan di daerah tersebut (Nurbaety & AP, 2020)

2.1.3 Sistem dan Komponen Kebijakan

Menurut Dunn (1994), Keterlibatan pemangku kepentingan, kebijakan publik, dan area pemangku kepentingan yang terkait dengan kebijakan tiga jaringan khusus yang saling mendukung telah menjadi semakin lemah. Tiga komponen penting dari kebijakan sistem berikut ini digambarkan dalam grafik.



Gambar 2. 1 Hubungan Komponen Dalam Sistem Kebijakan

Seperti yang dapat dilihat dari gambar di atas, kebijakan, yaitu suatu jenis obligasi, mencerminkan sebagian besar unsur utama sebagai suatu sistem dan bukan merupakan entitas yang berdiri sendiri. Ketika hukum umum mempengaruhi dan dipengaruhi oleh hukum publik, maka sistem hukum ketiga yang berlaku. bahkan hukum perundingan bersama, yang membantu membuat hukum umum lebih mudah diterapkan di bidang sains, politik, dan bahkan astronomi, tidak kebal terhadap dampak hukum lingkungan.

William Dunn (1994) memberikan informasi tambahan mengenai sistem dan elemen-elemen kebijakan publik sebagai berikut:

1. Isi Kebijakan (*content of policy*)

Isi terdiri dari berbagai petisi publik yang diajukan oleh komite dan badan-badan pemerintah, termasuk yang meminta mereka untuk berhenti membuat tuntutan tertentu. Spektrum yang luas dari isu-isu kehidupan, termasuk energi, kesehatan, pendidikan, pelestarian lingkungan, dan banyak lagi, tercakup dalam isi, semacam kebijakan publik. Kebijakan konten biasanya diubah menjadi:

- a) Pernyataan tujuan menggambarkan risiko yang diharapkan dan alasan di balik pembuatan kebijakan tersebut.

- b) Ruang lingkup kebijakan ini menguraikan perilaku yang diatur oleh kebijakan tersebut serta siapa saja yang tercakup di dalamnya.
- c) Masa berlakunya kebijakan menunjukkan awal penerapannya.
- d) Bagian pertanggung jawaban mengidentifikasi orang atau kelompok yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan.
- e) Pernyataan kebijakan; pernyataan ini menetapkan pedoman khusus, penyesuaian terhadap pedoman khusus, atau penyesuaian terhadap tindakan badan yang memberlakukan kebijakan tersebut.
- f) Latar belakang: memberikan informasi tentang penyebab dan perkembangan pembuatan kebijakan tersebut, yang sering dikenal sebagai faktor motivasi.
- g) Definisi: Memberikan definisi yang tepat dan tidak ambigu pada kata-kata dan konsep dalam teks kebijakan

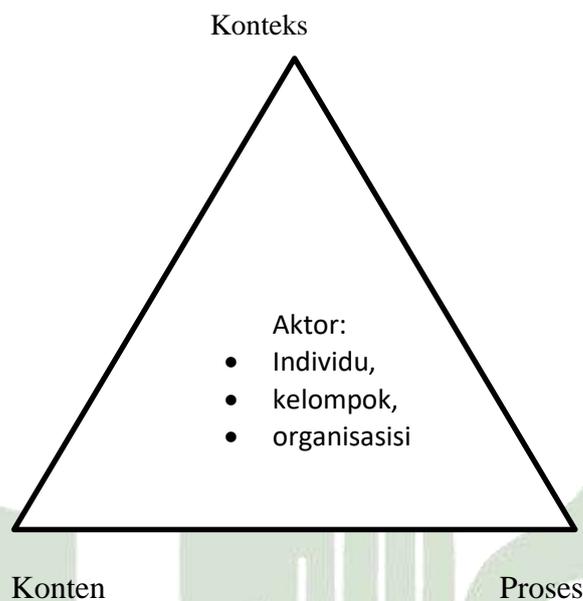
2. Aktor atau Pemangku Kepentingan Kebijakan (*Policy Stakeholder*).

Orang atau organisasi yang terkait erat dengan suatu kebijakan dan memiliki kekuatan untuk mempengaruhi atau dipengaruhi oleh keputusan atau kebijakan tersebut dikenal sebagai aktor kebijakan atau pemangku kepentingan. Sekelompok warga negara, serikat pekerja, pedagang kaki lima, komunitas jurnalis, partai politik, entitas pemerintah, dan sejenisnya biasanya merupakan pemangku kepentingan kebijakan.

3. Lingkungan Kebijakan (*Policy Environment*).

Konteks di mana sebuah kebijakan diimplementasikan, yang dikenal sebagai lingkungan kebijakan, adalah suatu hal yang unik dan dibentuk oleh kebijakan publik dan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Walt dan Gilson (1994) menggunakan kata konteks untuk menggambarkan lingkungan dari tiga

sistem hukum yang telah dibahas sebelumnya. Konteks ini memiliki sudut pandang yang sama dengan deskripsi Dunn tentang lingkungan kebijakan, yaitu unsur-unsur yang berdampak dan dipengaruhi oleh aktor lain dalam sistem kebijakan. Silakan lihat contoh di bawah ini.



Gambar 2. 2 Segitiga Kebijakan (Triangle of Health Policy)(Walt dan Gilson,1994)

Segitiga kesehatan merepresentasikan kesatuan hubungan yang rumit antara para pelaku, konteks, prosedur, dan isi kebijakan yang saling mempengaruhi satu sama lain dalam interaksinya. Para pelaku dalam ilmu sosial, baik individu maupun kelompok, sangat dipengaruhi oleh latar tempat mereka bekerja atau melakukan penelitian, yang merupakan salah satu ciri utama ilmu sosial. Kontekstual mengacu pada pemeriksaan atau hasil dari hubungan yang rumit antara berbagai elemen, termasuk nilai dan kepercayaan.(Budiyanti, Sriatmi, & Jati, 2020).

2.2 Analisis Kebijakan

2.2.1 Definisi Analisis Kebijakan

Analisis kebijakan, menurut Dunn (2003), adalah subbidang ilmu sosial terapan yang menghasilkan dan menyebarluaskan pengetahuan yang berkaitan dengan kebijakan melalui serangkaian metodologi ilmiah dan strategi penalaran. Pendekatan untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial yang dikenal sebagai analisis kebijakan dimulai dengan pengetahuan tentang proses perumusan kebijakan. (*knowledge in policy making*) Ini termasuk proses "mencari tahu", meneliti, dan memeriksa data mengenai kebijakan dan program publik, serta kinerja dan penyebabnya. Informasi ini kemudian disajikan kepada para pembuat kebijakan yang terlibat dalam pengambilan keputusan publik. agar dapat meningkatkan kinerja dan pembuatan kebijakan dengan memanfaatkan temuan-temuan analisis kebijakan. Pemahaman ini menjadikannya sedemikian rupa sehingga dalam mengembangkan kebijakan publik, komunikasi dan penerapan analisis kebijakan sering kali menjadi sangat penting.

2.2.2 Definisi Analisis Kebijakan Kesehatan

Untuk menghasilkan dan menyusun data terkait kebijakan yang dapat digunakan oleh para pembuat kebijakan untuk memecahkan masalah kebijakan kesehatan, berbagai metodologi penelitian dan analisis diterapkan dalam bidang analisis kebijakan kesehatan.

Analisis kebijakan kesehatan berperan dalam menerapkannya ke dalam praktik. Berikut ini adalah peran dan fungsinya:

1. Keputusan yang berkaitan dengan masalah yang perlu dipecahkan akan dimungkinkan dengan adanya analisis kebijakan kesehatan.

2. Analisis multidisiplin dapat dilakukan dengan analisis kebijakan kesehatan. Yang pertama adalah disiplin ilmu yang berfokus pada kebijakan, sedangkan yang kedua berfokus pada ilmu kesehatan. Dalam kapasitas ini, analisis kebijakan kesehatan menggabungkan keduanya, sehingga menghasilkan sebuah sub-bidang penelitian ilmiah yang baru.
3. Pemerintah dapat menentukan tindakan kebijakan seperti apa yang tepat untuk mengatasi masalah dengan menganalisis kebijakan kesehatan.
4. Memberikan kejelasan pada topik yang sebelumnya tidak jelas dengan membuat kebijakan dan keputusan yang relevan (Rahmanda, 2022a)

2.2.3 Lingkup Analisis Kebijakan

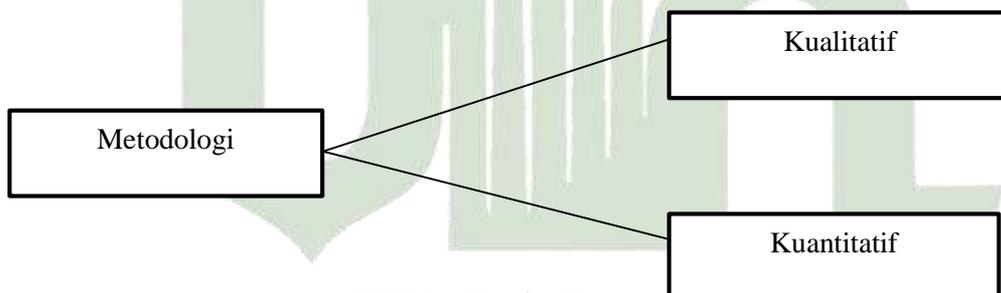
Analisis kebijakan dapat menyoroti area-area yang membutuhkan perhatian, seperti anomali dan pelanggaran yang membutuhkan tindakan untuk meningkatkan cara penerapan hukum dan meningkatkan hasil kesehatan yang lebih positif sesuai dengan metode dan materi, Untuk menyelesaikan masalah kebijakan, mempercepat proses implementasi, dan menjamin bahwa kebijakan tersebut akan lebih berhasil meningkatkan status kesehatan, analisis kebijakan menekankan perlunya intervensi yang sesuai (Desrinelti et al., 2021)

Portney 1986; Collins 2004 dalam (Desrinelti et al., 2021) mengatakan bahwa hal berikut ini harus menjadi bidang konsentrasi utama untuk analisis kebijakan: penciptaan kebijakan, sebab dan akibat, dan rekomendasi untuk setiap kebijakan tertentu. Selain itu, ada banyak sumber lain yang mendukung analisis tahap urutan kebijakan berikut penetapan masalah kebijakan (*problem information*) formulasi kebijakan (*policy formulation*) adopsi kebijakan (*policy*

adoption) implementasi kebijakan (*policy implementation*) dan evaluasi kebijakan (*policy evaluation*).

2.2.4 Metode Analisis Kebijakan

Dunn (2003) mengatakan bahwa untuk melakukan analisis kebijakan dan mengkomunikasikan informasi, metodologi yaitu, prosedur operasi standar, hukum, dan prosedur diperlukan. pengetahuan yang relevan dengan Kebijakan. Ciri-ciri utama dari pendekatan analisis kebijakan adalah sebagai berikut: pendekatan ini memprioritaskan penyelesaian dan perumusan masalah, pendekatan ini didedikasikan untuk evaluasi deskriptif dan evaluasi nilai, serta bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan dalam memilih berbagai pilihan kebijakan.



Gambar 2. 3 Metodologi Analisis Kebijakan (Dunn,1994b)

Dunn 1994 dalam (Desrinelti et al., 2021) menyatakan bahwa pemahaman yang menyeluruh mengenai desain studi, statistik, dan penggunaan spreadsheet serta perangkat statistik lainnya sangat diperlukan dalam teknik kuantitatif analisis kebijakan. Analisis regresi adalah salah satu metode yang digunakan untuk memperkirakan dampak dari sebuah variabel terhadap outputnya. Banyak prinsip, termasuk korelasi, varians, dan signifikansi statistik, yang harus diterapkan secara menyeluruh dalam analisis semacam ini. Metode kualitatif membutuhkan kehati-

hatian untuk melihat hal yang detail, analisis dilakukan dengan sering kali memerlukan pembacaan berulang pada catatan lapangan dan materi tulisan lain yang untuk menemukan pola dan hubungannya dalam data Informasi yang harus dapat digali dalam analisis kebijakan adalah sebagai berikut:

1. Masalah kebijakan adalah masalah yang dapat diselesaikan dengan tindakan atau perbaikan publik karena masalah tersebut merupakan nilai, kebutuhan, atau peluang yang belum ditangani.
2. Masa depan kebijakan konsekuensi dari serangkaian tindakan untuk pencapaian nilai-nilai dan karena itu merupakan penyelesaian terhadap suatu masalah kebijakan.
3. Sebuah gerakan atau serangkaian gerakan yang diperlukan oleh pilihan kebijakan dan dimaksudkan untuk memberikan hasil yang bermanfaat di masa depan dikenal sebagai tindakan kebijakan.
4. Hasil kebijakan konsekuensi yang teramati dari aksi kebijakan
5. Kinerja kebijakan: Sejauh mana hasil kebijakan saat ini dapat mendukung realisasi nilai-nilai.

Terkait dengan poin-poin di atas, metodologi untuk analisis penelitian sebelumnya harus memberikan informasi yang dapat digunakan untuk menilai keadaan masalah yang ada. Secara khusus, penelitian ini harus mengidentifikasi studi yang sedang berlangsung atau sebelumnya yang telah dilakukan untuk mengatasi masalah ini. dan apa konsekuensi yang dapat diharapkan serta beberapa hasil yang signifikan dalam hal resolusi konflik. Seperti yang telah dikatakan sebelumnya, jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut menghasilkan informasi mengenai isu-isu kebijakan, masa depan kebijakan, tindakan kebijakan, hasil

kebijakan, dan kinerja kebijakan.(Desrinelti et al., 2021).

2.2.5 Proses Analisis Kebijakan

Menurut Dunn W. N. (2003), dalam melakukan analisis kebijakan terdapat 5 proses yang harus dilakukan, yaitu:

1. Perumusan masalah Proses perumusan masalah melibatkan pengumpulan data mengenai keadaan yang mengarah pada isu-isu kebijakan. Merumuskan masalah dapat membantu mengungkap praduga, mengidentifikasi akar penyebab, menguraikan tujuan potensial, menyatukan sudut pandang yang berbeda, dan menciptakan peluang untuk kebijakan baru.
2. Peramalan memberikan informasi tentang apa yang akan terjadi di masa depan jika kebijakan alternatif diimplementasikan-termasuk tidak melakukan apa pun. Peramalan dapat memperkirakan akibat dari kebijakan yang ada atau yang diusulkan dan mengenali kendala-kendala yang mungkin akan terjadi dalam pencapaian tujuan.
3. Rekomendasi Menyediakan informasi mengenai nilai atau kegunaan relatif dari konsekuensi di masa depan yang terdapat pada suatu pemecahan masalah. Rekomendasi membantu dalam mendefinisikan kriteria untuk pengambilan keputusan, mengidentifikasi eksternalitas dan dampak ganda, memperkirakan tingkat risiko dan ketidakpastian, dan menetapkan akuntabilitas administratif untuk pelaksanaan kebijakan.
4. Observasi menghasilkan informasi mengenai dampak dari pemberlakuan kebijakan alternatif di masa lalu dan sekarang. Pemantauan atau monitoring dapat membantu dalam menilai tingkat kepatuhan, menemukan akibat-akibat yang tidak diinginkan dari kebijakan dan program, mengidentifikasi

hambatan dan rintangan implementasi, dan menemukan letak pihak-pihak yang bertanggungjawab pada setiap tahap kebijakan.

5. Evaluasi dapat menjelaskan perbedaan kinerja kebijakan sebagaimana yang diinginkan dengan pelaksanaannya. Evaluasi tidak hanya menghasilkan kesimpulan mengenai sejauh mana masalah telah dipecahkan, tetapi juga membantu mengklarifikasi dan mengkritisi prinsip-prinsip yang mendasari kebijakan tersebut, yang memfasilitasi perumusan ulang dan penyesuaian masalah.

2.3 Implementasi Kebijakan

2.3.1 Definisi Implementasi Kebijakan

Purwanto 2012 dalam (Rahmanda, 2022b) menyatakan bahwa distribusi output kebijakan terjadi sepanjang pelaksanaan kebijakan. (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para pelaksana kepada para kelompok sasaran (target group) untuk mewujudkan tujuan dari kebijakan. Meter dan Horn 1975 dalam (Rahmanda, 2022a) menyatakan bahwa untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam pilihan kebijakan, orang atau kelompok di sektor publik dan komersial juga harus mengambil tindakan yang tepat.

Implementasi dipandang seolah sebagai proses transaksi yang berarti untuk melaksanakan program, pelaksana (*implementor*) harus menyelesaikan tugas yang telah dijanjikan, termasuk memenuhi kebutuhan klien dan tantangan lingkungan. Formalitas yang terkait dengan organisasi dan administrasi sangat penting untuk implementasi, tetapi penyelesaian konteks, kepribadian, aliansi, dan aktivitas yang berkelanjutan pada akhirnya akan menentukan keberhasilan (Rahmanda, 2022a)

2.3.2 Model Analisis Implementasi Kebijakan

1. Pendekatan Sistem

Pendekatan Sistem adalah upaya untuk memecahkan masalah dengan memeriksa secara cermat isu-isu yang ada dan melakukan analisis metodis. Ketika dihadapkan pada masalah yang kompleks, pendekatan sistem diperlukan untuk menganalisis masalah dan memahami hubungan di antara berbagai komponennya.

Unsur-unsur atau komponen dasar sistem adalah :

- a. Input ialah kumpulan elemen/bagian yang terdapat dalam sistem dan yang diperlukan untuk dapat berfungsinya sistem tersebut, gambaran ketersediaan rencana kerja/kebijakan stunting sebagai metode, memberikan gambaran ketersediaan SDM pelaksana program stunting yang tersedia, gambaran sarana dan prasarana program yang tersedia, dan ketersediaan dana untuk menjalankan program yang telah direncanakan
- b. Proses adalah gambaran kerangka kerja yang terjadi, yang meliputi plan atau perencanaan, do atau pelaksanaan, check atau evaluasi, dan act atau tindakan yang telah dilakukan. Proses adalah kumpulan elemen/bagian yang berfungsi untuk mengubah masalah menjadi output yang direncanakan.
- c. Output merupakan kumpulan komponen yang dihasilkan dari proses sistem memberikan gambaran umum tentang keluaran yang diharapkan untuk program, termasuk informasi tentang keberhasilan dan kemajuannya umpan balik tentang pelaksanaannya pertimbangan untuk perencanaan dan peningkatan akuntabilitas program kesadaran akan tantangan yang dihadapi selama pelaksanaan program dan pertimbangan untuk

memberikan saran-saran untuk mencapai keberhasilan program (Aep Saefullah, 2022).

2.4 Stunting

2.4.1 Pengertian Stunting

Balita stunting adalah masalah gizi kronis yang dapat disebabkan oleh berbagai keadaan, termasuk status sosial ekonomi, gizi ibu selama kehamilan, ketidaknyamanan bayi, dan makanan bayi yang tidak mencukupi. Di masa depan, balita yang mengalami stunting akan mengalami kesulitan untuk mencapai potensi penuhnya, baik dalam hal perkembangan fisik maupun kognitif. (Kemenkes RI, 2023)

Stunting (kerdil) adalah kondisi dimana balita memiliki panjang atau tinggi badan yang kurang jika dibandingkan dengan umur. Untuk mencapai keluarga yang sejahtera, ibu memegang peranan penting dalam menjaga kualitas keluarga, yang meliputi faktor pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, kemandirian keluarga, serta spiritualitas dan nilai-nilai agama. Evaluasi antropometri digunakan untuk mengukur status gizi secara langsung untuk menentukan kondisi stunting. (Kirana, 2022).

2.4.2 Epidemiologi Stunting

Stunting terjadi pada 1 dari 3 anak yang bertempat tinggal di negara berkembang serta negara miskin, dengan prevalensi stunting paling tinggi di Asia Selatan yakni 46% selanjutnya di Afrika yakni 38%, serta secara keseluruhann prevalensi stunting di negara miskin juga berkembang yakni 32%. Stunting disebabkan Keterlambatan perkembangan fisik, berkurangnya kemampuan kognitif, dan berkurangnya kapasitas penalaran (UNICEF, 2021).

Studi epidemiologi menjelaskan bahwa dalam trias epidemiologi terdapat 3 interaksi patogen yaitu host merupakan faktor yang ada pada manusia yang dapat mempengaruhi dan mengembangkan penyakit. Agen dapat menyebabkan penyakit atau mempengaruhi perjalanan penyakit. Environment yaitu segala sesuatu yang mengelilingi manusia dan mempengaruhi kehidupan dan perkembangan manusia (Hidaya & Umaroh, 2023)

2.4.3 Faktor-Faktor Penyebab Stunting

Masalah dengan asupan gizi yang dikonsumsi selama masa kehamilan dan masa balita juga dapat menyebabkan stunting. Stunting juga dapat disebabkan oleh ketidaktahuan ibu akan kesehatan dan gizi sebelum hamil, selama masa nifas, dan karena kurangnya akses terhadap perawatan prenatal dan pascakelahiran, makanan padat gizi, air bersih, dan fasilitas sanitasi. Multi faktor yang sangat beragam tersebut membutuhkan intervensi yang paling menentukan yaitu pada 1000 HPK (1000 hari pertama kehidupan).

Stunting juga disebabkan oleh beberapa faktor lain, termasuk pendidikan ibu, pengetahuan ibu tentang gizi, pemberian ASI eksklusif, usia pemberian MP-ASI, kecukupan seng dan zat besi, riwayat penyakit infeksi, dan faktor genetik. Pekerjaan ibu, tinggi badan ayah, tinggi badan ibu, pendapatan, jumlah anggota rumah tangga, pola asuh, dan pemberian ASI eksklusif juga menjadi faktor yang mempengaruhi stunting.

Penyakit infeksi yang terkait dengan prevalensi stunting pada balita yang tinggal di daerah pedesaan dan perkotaan juga menjadi perhatian. Penyakit infeksi termasuk diare, infeksi saluran pernapasan atas, cacingan, dan penyakit lain yang terkait dengan gangguan kesehatan kronis adalah masalah kesehatan yang paling

umum terjadi pada anak-anak.(Kemenkes RI, 2019)

2.4.4 Dampak Stunting

Kasus stunting pada umur dini paling utama pada 1000 HPK, akan berakibat pada mutu Sumber Daya Manusia (SDM). Stunting membuat organ badan tidak berkembang serta maksimal. Perkembangan stunting pada usia dini bisa memicu tumbuh pendek pada usia remaja(Laily, Indarjo, & Artikel, 2023)

1. Kognitif lemah dan psikomotorik terhambat

Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang mengalami stunting memiliki masalah perkembangan pada kemampuan kognitif dan psikomotoriknya. Persentase anak yang mengalami stunting, malnutrisi, dan kurang gizi di suatu negara juga akan mempengaruhi persentase sumber daya manusia berkualitas tinggi yang tercipta. Hal ini menyiratkan bahwa tingkat keparahan epidemi stunting pada anak saat ini akan mempengaruhi kondisi negara di masa depan.

2. Kesulitan menguasai sains dan berprestasi dalam olahraga

Dibandingkan dengan anak-anak yang tumbuh dengan baik, anak-anak yang tumbuh dan berkembang secara tidak proporsional saat ini biasanya memiliki kapasitas intelektual di bawah rata-rata. Akan lebih sulit bagi generasi yang dibesarkan dengan kapasitas kognitif dan intelektual yang lebih rendah untuk memahami ilmu pengetahuan dan teknologi karena mereka akan memiliki kemampuan analisis yang lebih rendah.

3. Lebih mudah terkena penyakit degeneratif

Stunting mempengaruhi kapasitas intelektual negara secara langsung dan bertindak sebagai tindakan pencegahan tidak langsung terhadap penyakit

degeneratif, atau penyakit yang memburuk seiring bertambahnya usia.

4. Sumber daya manusia berkualitas rendah

Kurang gizi dan stunting saat ini, menyebabkan rendahnya kualitas sumber daya manusia usia produktif. Masalah ini selanjutnya juga berperan dalam meningkatkan penyakit kronis degeneratif saat dewasa.(Dasman, 2019)

2.4.5 Upaya Pencegahan Stunting

Stunting ialah salah satu sasaran SDGs yang terletak ditujuan pembangunan berkelanjutan ke-2 yakni menghapuskan kelaparan serta semua bentuk malnutrisi ditahun 2030 juga ketahanan pangan tercapai. Ketetapan sasaran penurunan stunting sampai 40% pada tahun 2025. Demi mewujudkan hal itu, pemerintah menentukan stunting menjadi salah satu program prioritas. Usaha yang dilaksanakan untuk menurunkan stunting dari Peraturan Menteri Kesehatan No. 39 Tahun 2016 mengenai Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat yakni :

a. Ibu Hamil dan Bersalin

1. Intervensi 1000 HPK;
2. Mengusahakan jaminan kualitas ante natalcare (ANC) terpadu;
3. Peningkatan persalinan difasilitas kesehatan;
4. Mengadakan rencana pemberian makanan tinggi, kalori, protein serta mikronutrien (TKPM).

b. Balita

1. Pengamatan pertumbuhan balita;
2. Mengadakan aktivitas Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk balita;

3. Mengadakan stimulus dini perkembangan anak; dan
4. Memaksimalkan pelayanan kesehatan.

c. Anak Usia Sekolah

1. Melakukan revitalisasi Usaha Kesehatan Sekolah (UKS);
2. Menkuatkan kelembagaan Tim Pembina UKS;
3. Menyelenggarakan Program Gizi Anak Sekolah (PROGAS); dan
4. Menetapkan sekolah menjadi area bebas rokok juga narkoba.

d. Remaja

1. Konseling perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), pola gizi seimbang, tidak merokok, serta mengkonsumsi narkoba
2. Pendidikan kesehatan reproduksi.

e. Peningkatan Dewasa Muda

1. Konseling serta pelayanan keluarga berencana (KB);
2. Deteksi dini penyakit (menular dan tidak menular)
3. Peningkatan penyuluhan PHBS, pola gizi seimbang, tidak merokok/mengonsumsi narkoba(Kemenkes RI, 2019)

2.4.6 Kebijakan Penanggulangan Stunting

Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional

Perbaikan Gizi diterbitkan untuk mendukung dalam upaya penanggulangan partisipasi dan kepedulian pemangku kepentingan secara terencana dan terkoordinir untuk mempercepat perbaikan gizi dalam 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Sebagai hasilnya, perangkat untuk dukungan kebijakan dalam percepatan perbaikan gizi sudah cukup lengkap dan saat ini hanya perlu diterapkan secara sistematis di semua tingkatan oleh semua pihak yang terlibat.

Dengan keluarnya Peraturan Presiden ini, seluruh pemangku kepentingan harus melakukan upaya yang lebih terpadu untuk mengintegrasikan kegiatan lintas program (upaya spesifik) dan lintas sektor (upaya sensitif) dengan fokus pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) (Purnaningsih, Lu, Sriyanto, & Fatimah, 2023).

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi yang menegaskan tentang penyusunan Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN-PG) dan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) untuk mencapai sumber daya manusia yang kompetitif dan berkualitas tinggi untuk pertumbuhan pangan dan gizi. Selain itu, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dapat mempercepat pembangunan gizi dengan meningkatkan pengetahuan tentang gizi seimbang dan ketersediaan makanan sehat. (Rahmanda, 2022a)

Pelaksanaan kegiatan pencegahan stunting terintegrasi dilaksanakan dengan keluarnya Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 61/PMK.07/2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi. Integrasi atau konvergensi program dan kegiatan yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan aksi intervensi pencegahan stunting yang terintegrasi, Siklus perencanaan dan penganggaran pembangunan dilakukan secara sinergis, terpadu, terarah, dan berkesinambungan untuk mencegah terjadinya situasi yang dapat mengakibatkan kegagalan tumbuh kembang anak sebelum usia lima tahun.

Dua intervensi yang dimaksud berkaitan dengan Pencegahan Stunting Terpadu. Intervensi pertama adalah intervensi gizi spesifik, yang berfokus pada pengobatan infeksi atau penyakit serta penyediaan makanan dan gizi yang memadai. Intervensi ini juga menangani penyebab langsung stunting. Selain itu, intervensi yang berfokus pada penyebab tidak langsung dari stunting dikenal sebagai intervensi gizi sensitif. Intervensi ini mencakup perluasan ketersediaan makanan padat gizi, peningkatan kesadaran, komitmen, dan praktik gizi ibu dan anak, peningkatan kualitas dan aksesibilitas layanan gizi dan kesehatan, serta memastikan akses terhadap air bersih dan fasilitas sanitasi. (Rahmanda, 2022a)

Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2018 dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Langkat tentang Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting Terpadu. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan sumber daya manusia dan standar gizi individu, keluarga, dan masyarakat. Ruang lingkup pencegahan dan penanggulangan stunting berkaitan dengan intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif. Sasaran untuk intervensi gizi spesifik, meliputi ibu hamil, ibu nifas, ibu menyusui dan anak dibawah usia 6 bulan, serta ibu menyusui dan anak usia 7-23 bulan

2.5 Gerakan 1000 Hari Pertama Keidupan (HPK)

2.5.1 Pengertian Gerakan 1000 HPK

Gerakan 1000 HPK merupakan kegiatan percepatan perbaikan gizi yang diangkat dari kegiatan Gerakan Scaling Up Nutrition (SUN). Gerakan SUN merupakan gerakan global di bawah koordinasi Sekretaris Jenderal PBB. Hadirnya gerakan ini merupakan bentuk respon dari negara-negara di dunia terhadap kondisi status pangan dan gizi di negara-negara berkembang.

Tujuan global dari SUN Movement ialah guna mengecilkan kasus gizi

pada 1000 HPK, yakni dari awal kehamilan sampai usia 2 tahun. Istilah "periode emas" mengacu pada periode 1000 HPK karena telah terbukti secara ilmiah sebagai waktu di mana kualitas hidup seseorang terjamin. (Rahmanda, 2022a)

Upaya 1000 HPK bersama dengan Peraturan Bupati Langkat tentang Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting, merupakan upaya partisipatif berbasis masyarakat yang bertujuan untuk mempercepat pencegahan dan solusi stunting.

2.5.2 Visi, Misi, dan Gerakan 1000 HPK

Pedoman Perencanaan Program 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) tahun 2012 memberikan uraian sebagai berikut :

1. Visi

” Memenuhi kebutuhan pangan dan gizi untuk menjunjung tinggi hak-hak ibu dan anak serta mengembangkan potensi mereka”.

2. Misi

1. Memastikan kolaborasi antara para mitra untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi ibu dan anak
2. memastikan bahwa pendidikan gizi diterapkan dengan benar dan efektif untuk meningkatkan standar perawatan gizi yang diberikan kepada ibu dan anak.

3. Indikator hasil

1. Telah terjadi penurunan sebesar empat puluh persen dalam kejadian stunting di kalangan balita.
2. Persentase balita yang mengalami wasting telah diturunkan menjadi kurang dari 5%.

3. Menurunkan angka bayi berat lahir rendah sebesar 30%.
4. Meniadakan angka kenaikan anak yang mengalami gizi lebih.
5. Terdapat penurunan sebesar lima puluh persen dalam persentase ibu yang mengalami anemia pada kelompok usia reproduksi.
6. Terdapat peningkatan sebesar 50% dalam proporsi ibu yang menyusui bayinya secara eksklusif selama enam bulan (Rahmanda, 2022a)

2.5.3 Kegiatan Dalam Gerakan 1000 HPK

Badan Pembangunan Nasional 2013 (Rahmanda, 2022a) Menurut Pedoman Perencanaan Program Gizi 1000 HPK, ada dua kategori kegiatan yang membentuk gizi 1000 HPK, yaitu intervensi sensitif dan intervensi target. Jika kedua intervensi ini dapat bekerja sama, maka akan memberikan dampak yang tahan lama dan berkelanjutan, sehingga akan menjadi sangat baik.

1. Intervensi Spesifik

Gerakan yang dibuat khusus untuk kelompok 1000 HPK dikenal sebagai program intervensi khusus, dan sektor kesehatan biasanya mengimplementasikan inisiatif ini. (Badan Pembangunan Nasional, 2013). Aksi intervensi gizi spesifik dan tujuannya diuraikan dalam Peraturan Bupati Langkat Nomor 10 Tahun 20218 tentang Percepatan Pencegahan dan Pengendalian Stunting Terintegrasi.

1. Ibu hamil

- a. Wanita hamil harus makan lebih banyak untuk mengganti kekurangan protein dan kalori dalam jangka panjang.
- b. Mengatasi kekurangan zat besi dan asam folat.
- c. Mengatasi kekurangan iodium.
- d. Menanggulangi kecacingan pada ibu hamil.

- e. melindungi ibu hamil dengan kondisi parah seperti hepatitis, diabetes melitus, hipertensi, dan pasca operasi.

2. Ibu nifas

- a. Pemberian vitamin A
- b. Ibu menyusui dan anak dibawah 6 bulan
- c. Mendorong inisiasi menyusu dini (IMD).
- d. Mendorong pemberian ASI Eksklusif.

3. Ibu menyusui dan anak usia 7-23 bulan

- a. Promosikan pemberian ASI eksklusif dengan pemberian makanan pendamping ASI (MP-ASI) hingga anak berusia 23 bulan.
- b. Menyediakan obat cacing.
- c. Menyediakan suplemen zinc.
- d. Menyediakan vitamin A.
- e. Melakukan fortifikasi zat besi ke dalam makanan.
- f. melindungi ibu menyusui dengan kondisi parah seperti hepatitis, diabetes melitus, hipertensi, pasca operasi, dan lainnya.
- g. Memberikan imunisasi lengkap.
- h. Menerapkan langkah-langkah pencegahan, pengendalian, dan pengobatan diare.

2. Intervensi Sensitif

Intervensi gizi sensitif mencakup berbagai upaya sektor non-kesehatan yang ditujukan untuk masyarakat umum, bukan hanya untuk 1000 HPK. pengaruhnya terhadap perkembangan dan pertumbuhan kelompok 1000 HPK akan lebih besar jika dilaksanakan bersamaan dengan tindakan dalam intervensi tertentu.

Dokumen SUN Inggris menyebutkan bahwa intervensi gizi spesifik yang umumnya dilaksanakan oleh sektor kesehatan hanya 30% efektif mengatasi masalah gizi 1000 HPK. Hal ini disebabkan oleh kompleksitas masalah terkait gizi, terutama masalah "beban ganda", yang menggabungkan penyakit tidak menular (PTM) dan anak-anak kurus, pendek, dan obesitas yang hidup berdampingan di masyarakat kurang mampu. Untuk mencapai target 70%, berbagai sektor pembangunan di luar sektor kesehatan harus dilibatkan (Rahmanda, 2022a).

2.5.4 Monitoring dan Evaluasi dan Gerakan 1000 HPK

Program Gerakan 1000 HPK memiliki indikator-indikator spesifik yang disusun secara rinci untuk menilai program dan capaian kinerja terhadap penurunan masalah gizi spesifik yang langsung ditangani oleh sektor kesehatan sesuai dengan rekomendasi Lancet/SUN. Tujuan akhir dari indikator-indikator ini adalah untuk mengatasi penyebab utama dari masalah gizi kurang atau gizi lebih. Penilaian indikator spesifik dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 1 Indikator Intervensi Gizi Spesifik

Kegiatan	Indikator
Ibu Hamil	
a. pertahanan terhadap defisit kalori dan protein jangka panjang, kekurangan asam folat, dan kekurangan zat besi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ % Cakupan Suplementasi Besi-Folat ▪ % Cakupan Suplementasi Ibu dengan Zat Gizi Mikro ▪ % Ibu Hamil Mengonsumsi Energi (<70% AKG) ▪ % Ibu Hamil Terdapat Asap Rokok (perokok pasif) ▪ Jumlah Praktik IMD dan ASI Eksklusif Termasuk Pemberian Konseling KB

b. Perlindungan Terhadap Kekurangan Iodium	% Ibu Mengonsumsi Garam Beriodium
c. Perlindungan Ibu Hamil Terhadap Malaria	<ul style="list-style-type: none"> ▪ % Cakupan Ibu Hamil Mendapat Pengobatan Malaria ▪ % kelambu Berinsektisida
Ibu Menyusui	
Asi Eksklusif	<ul style="list-style-type: none"> ▪ % Cakupan Promosi ASI Perorangan Dan Kelompok ▪ % Cakupan Sasaran Yang Telah Terpapar KIE Gizi
Anak Umur 0-23 Bulan	
Makanan Pendamping Imunisasi, Mikronutrien, dan Air Susu Ibu (MP-ASI)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ % cakupan KIE pemberian MP-ASI ▪ % cakupan pemberian MP-ASI anak usia > 6 bulan ▪ % anak mendapatkan akses garam beriodium ▪ % cakupan pemberian zinc pada kejadian diare ▪ % cakupan gizi buruk akut yang ditangani ▪ % cakupan pemberian suplementasi vitamin A ▪ % cakupan konsumsi sprinkle ▪ % cakupan kecacingan yang diobati ▪ % menurunnya angka prevalensi kecacingan ▪ % cakupan program PKH ▪ % cakupan pendistribusian kelambu berinsektisida ▪ % cakupan pemberian imunisasi

2.6 Kajian Integrasi Keislaman

2.6.1 Prespektif Ilmu Pengetahuan dalam kaitan kajian Integrasi ilmu keislaman

Perspektif ilmu pengetahuan dikaitkan dengan kajian integrasi keislaman maka ada dua hal penting yang perlu di catat sebagaimana di tulis oleh Prof. Dr. Azhari Akmal Tarigan, M.Ag dalam buku Diskursus Integrasi Ilmu halaman 66 dimana didalam buku tersebut di jelaskan merujuk kepada Shabra sebagai seorang ilmuan menurut nya ada tiga tahapan dalam menguraikan kontak dan persentuhan ilmu agama dengan ilmu-ilmu sekuler.

Menerjemahkan karya-karya dari bahasa Yunani dan Syiria ke dalam bahasa Arab adalah langkah pertama, atau Fase Akuisisi. Sejak saat itu, ilmu pengetahuan Yunani telah memasuki peradaban Islam untuk pertama kalinya. Yang perlu dicatat, mungkin, adalah bahwa ilmu pengetahuan Yunani masuk ke dalam Islam melalui undangan dan bukan sebagai penjajah.

Fase kedua, yang dikenal sebagai Fase Adopsi, adalah ketika tuan rumah - dalam hal ini Islam - mulai menerima dan menghargai kenang-kenangan yang dibawa oleh para tamu. Menurut tulisan Shabra, daya tarik tamu jauh lebih besar daripada potensi manfaatnya. Penerimaan yang mengejutkan dan tanpa syarat terhadap Hellenisme oleh Al-Kindi adalah bukti kemampuan persuasifnya. Banyak intelektual Muslim terbesar dari fase kedua ini memiliki sudut pandang Hellenisme yang sama. Adapun pemikir-pemikir tersebut seperti AL-Farabi, Ibn Haistam, Al- Biruni dan Ibn Rusyd.

Tahap ketiga, yang dikenal sebagai tahap integrasi, adalah ketika ide-ide para pemikir Muslim yang disebutkan di atas, termasuk Al-Farabi, mulai diterapkan dan dimasukkan ke dalam diskusi-diskusi kalam (teologi) dan ilmu-ilmu lainnya. Selain menerima dan menikmati situasi tersebut, tuan rumah kini mampu menyiapkan dan memasak makanannya sendiri, merancang menu-menu baru, dan mempromosikannya kepada khalayak yang lebih luas. Inilah yang ditunjukkan oleh Al-Khawarizmi, Umar Al-Khayyam dalam Matematika, Ibn Sina dan Ibn Nafis dalam Kedokteran, Ibn al-Haystam dan Ibn Syatir dalam Astronomi, Al-Biruni dan Al-Idris dalam Geografi serta ilmuan lainnya.

Dan pada halaman 88 karya Prof.Dr. Azhari Akmal Tarigan,M.Ag dapat dilihat bahwa menurut Al-Faruqi mengutip dari ilmu beliau dimana menyatakan untuk mewujudkan gagasan besar ini, Al-Faruqi telah membuat rencana aksi untuk Islamisasi Pengetahuan, yang menurutnya dimulai dengan:

- a. Penguasaan disiplin ilmu modern.
- b. Penguasaan khasanah Islam.
- c. Penentuan relevansi Islam bagi masing-masing bidang ilmu modern.
- d. Pencarian sintesa kreatif antara khasanah Islam dengan ilmu modern.
- e. Pengarahan aliran pemikiran Islam ke jalan-jalan yang mencapai pemenuhan pola rencana Allah SWT.

Selain itu, sejumlah tindakan telah dikembangkan untuk mencapai tujuan-tujuan ini, dan tindakan-tindakan tersebut harus diselesaikan dengan urutan yang menetapkan prioritas setiap langkah. Tindakan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Penguasaan disiplin ilmu modern: Penguraian kategoris.

- b. Survei disiplin ilmu.
- c. Penguasaan khasanah Islam: Sebuah antologi.
- d. Penguasaan khasanah Ilmiah Islam Tahap Analisa.
- e. Penentuan relevansi Islam yang khas terhadap disiplin- disiplin ilmu.
- f. Penilaian kritis terhadap disiplin ilmu Modern: Tingkat perkembangan masa kini.
- g. Penilaian kritis terhadap khasanah Islam: Tingkat per- kembangannya dewasa ini.
- h. Survei permasalahan yang dihadapi umat Islam.
- i. Survei permasalahan yang dihadapi umat manusia.
- j. Analisa kreatif dan sintesa.
- k. Penuangan kembali disiplin ilmu modern ke dalam kerangka Islam: Buku- buku dasar tingkat universitas.
- l. Penyebarluasan Ilmu-ilmu yang telah diislamkan.

2.6.2 Konsep Kebijakan Dalam Islam

Salah satu pelajaran syariah yang sangat ditekankan oleh Al-Qur'an adalah konsep kebijakan, yang dapat ditemukan dalam dua pola kehidupan manusia yang berbeda: rumah kecil, yaitu rumah tangga yang terdiri dari keluarga kecil, dan rumah besar, yaitu negara yang terdiri dari para pemimpin dan warga negara. Konsep kebijakan merupakan suatu landasan tegaknya kesamaan hak dan kewajiban dalam kehidupan manusia. Kebijakan yang akan ditetapkan haruslah merupakan keputusan dan kesepakatan bersama, sehingga dapat dilaksanakan dengan antusias dan kebijakan memerlukan adanya evaluasi untuk mengetahui sejauh mana hasil dari kebijakan yang telah dilaksanakan (Rosyidi, 2019)

Konsep kebijakan ini sudah pernah diterapkan pada zaman Rasulullah saw yang tertuang dalam QS Ali-'Imraan ayat 159:

﴿ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۗ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۚ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ۗ ﴾

Artinya: Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal.

Dalam tafsirnya atas Surat Ali Imran, Muhammad Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat 159 dari Surat Ali Imran menguraikan prasyarat bagi seorang pemimpin yang akan berhasil dalam bermusyawarah. Bersikaplah baik pada awalnya-tidak kasar atau tidak berperasaan. Quraish Shihab mengatakan bahwa jika seorang pemimpin bertindak tidak sesuai dengan batasan sebelumnya, mitra musyawarah akan mundur. Agar berhasil dalam musyawarah, para pemimpin harus memiliki dua sikap utama memaafkan dan kesediaan untuk memulai kembali ketika berhadapan dengan mereka yang melakukan kesalahan. Terakhir, musyawarah tidak hanya membutuhkan logika dan akal sehat tetapi juga hati, Menurut Quraish Shihab, hati seseorang mampu menyerap pendapat dan pemikiran orang lain, yang mungkin saja terjadi secara tiba-tiba dan tidak terduga. (Nurhartanto, 2020).

2.6.3 Implementasi Kebijakan Dalam Islam

Keberhasilan kebijakan sangat ditentukan pada tahap implementasinya dan

keberhasilan proses implementasi ditentukan oleh kemampuan pelaksana kebijakan atau program yang disebut implementor. Salah satu faktor keberhasilan proses implementasi yaitu kepatuhan implementor mengikuti apa yang diperintahkan oleh atasan atau pimpinan (Akib, 2020). Kepatuhan mengikuti apa yang diperintahkan oleh atasan atau pimpinan tertuang dalam QS An-Nisaa ayat 59 sebagai berikut:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).

Dalam ayat 59 surah An Nisaa Dinyatakan bahwa masyarakat harus taat kepada Ulil Amri, namun pernyataan Nabi Saw. bahwa dilarang taat kepada makhluk yang mendurhakai Khaliq harus ditekankan lagi. Meskipun demikian, meskipun mengikuti ulil amri tidak membuat seseorang merasa nyaman dengan diri mereka sendiri, hal itu harus dilakukan jika tidak menyebabkan atau mengandung dosa (Katsir, 2021).

2.6.4 Pentingnya Mencegah Anak Agar Tidak Mengalami Stunting Dalam Islam

Sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadits, berusaha untuk menghasilkan generasi yang kuat, sehat, dan sehat secara mental yang tumbuh dan berkembang dengan kecepatan yang ideal tanpa mengalami stunting dianggap sebagai

kewajiban agama dan merupakan pemenuhan perintah Allah yang terdapat dalam Al-Qur'an. (Ebing, 2019). Al-Quran menerangkan tentang tidak dianjurkannya umat Islam meninggalkan anak keturunan yang lemah Allah SWT berfirman dalam QS AnNisaa ayat 9 sebagai berikut:

﴿وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا

قَوْلًا سَدِيدًا﴾

Artinya: Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya).

Bagi kita semua, upaya untuk menurunkan angka stunting adalah tindakan kebaikan agama. Sesuai dengan lingkup tanggung jawabnya, setiap pihak dituntut untuk mengambil tindakan yang tepat, mulai dari orang tua/wali, keluarga, masyarakat, pemerintah daerah, hingga negara. Kebijakan yang ditujukan untuk mencegah stunting diharapkan dapat menciptakan generasi yang ideal sesuai dengan Al Qur'an dan Hadist, generasi yang bertakwa dan memiliki fisik, mental, dan spiritual yang kuat. Generasi ini diharapkan mampu memimpin generasi pemimpin dunia selanjutnya. Saat ini banyak orang yang tidak peduli dengan kesehatannya dan tidak terlalu memikirkannya. maka manusia dengan rela membayarnya meskipun dengan harga yang mahal. Seperti yang telah tertuang dalam sebuah hadis Rasulullah Saw bersabda, “Dua nikmat yang sering kali manusia tertipu oleh keduanya, yaitu kesehatan dan waktu luang” (HR Bukhari, Imam Ahmad dan Tarmidzi) (Ebing, 2019).

Karena itu Al-Qur'an menegaskan , agar memberikan makanan yang sehat dan halal kepada anaknya yang dimana Allah SWT berfirman dalam QS Al-Baqarah 168 ayat sebagai berikut:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ

عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾

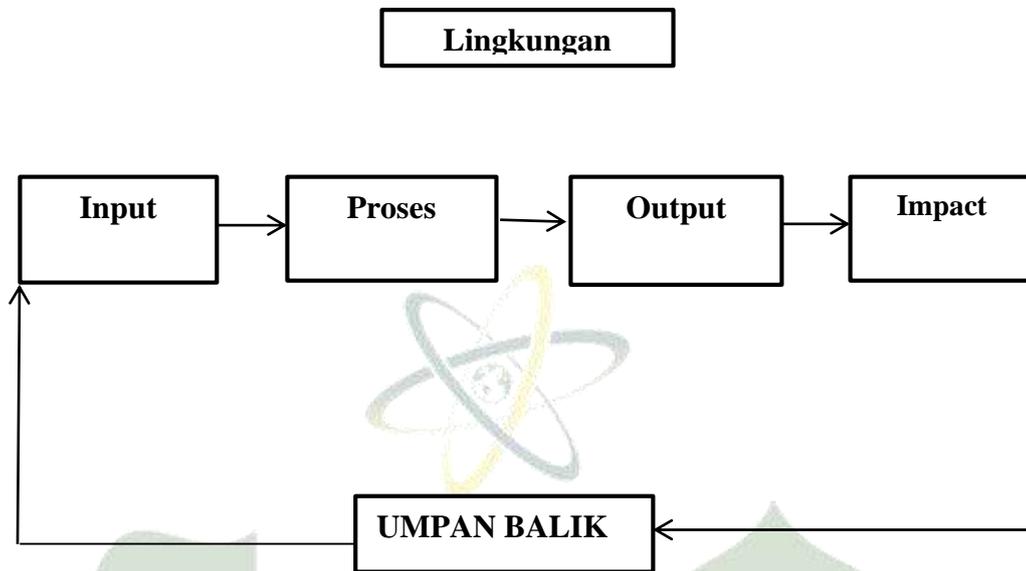
Artinya : Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata.

Allah SWT, sang pencipta yang maha segalanya, telah menetapkan apa yang dikenal sebagai ukuran, batas, dan takaran yang bermakna dalam domain ini. Keselamatan dan kebajikan manusia hanya akan tercapai dalam rancangan Allah SWT ketika manusia mencapai puncaknya. Tentu saja dalam semua aspek kehidupan. Termasuk didalamnya kaitannya dengan pemenuhan gizi kesehatan.

Dalam hadits riwayat Ibnu Majah dari Salman Al Farisi bahwa Rasulullah Saw pernah ditanya tentang hukum samin, keju, keledai hutan, maka jawab beliau:” Yang halal adalah sesuatu yang Allah halalkan dalam kitab-Nya dan yang disebut haram adalah yang Allah haramkan dalam kitab-Nya. Sedang apa yang Allah diamkan, maka itu adalah salah satu yang Allah maafkan buat kamu”. (al-Hadis). Berdasarkan hadits tersebut, ada satu kaidah usul fikih mengatakan bahwa: Hukum asal pada sesuatu adalah boleh”. Maksudnya adalah semua makana dan minuman pada dasarnya halal untuk dikonsumsi. Adapun Thoyyib, secara bahasa maknanya adalah baik Maksudnya adalah baik untuk jasmani maupun ruhani konsumennya (Mentor, 2022).

2.7 Kerangka Teori

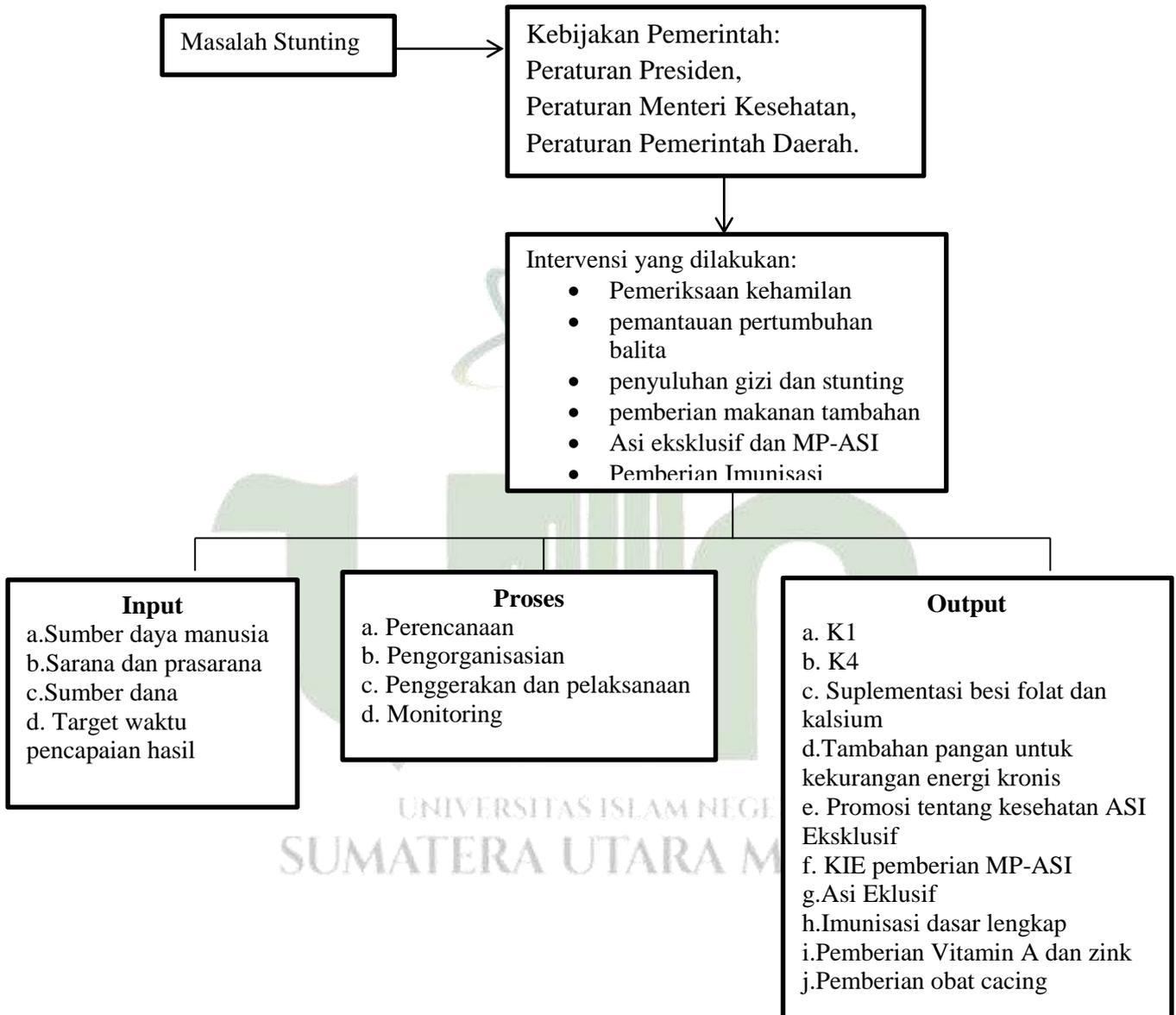
Kerangka teori yang menjadi dasar kerangka teori penelitian ini diuraikan sebagai berikut:



Gambar 2. 4 Kerangka Teori
Pendekatan Sistem Luwdwig Von Bertalanffy (1951)

2.8 Kerangka Pikir

Kerangka Pikir penelitian berikut ini dapat dibuat untuk mengukur penggunaan pencegahan stunting dengan menggunakan Pendekatan Sistem sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan:



Gambar 2. 5 Kerangka Pikir

Kerangka pikir penelitian implementasi kebijakan stunting mengacu pada Luwdwig Von Bertalanffy (1951); Perpres 2021; Permenkes Tahun 2019, Perbup Langkat tahun 2018.